

DIMENSI PERDAGANGAN KELAPA DAN KOPRA RAKYAT DI SULAWESI UTARA

Oleh:
Budiman Hutabarat, Tri Pranadji dan Aladin Nasution*)

Abstrak

Pengembangan produksi kelapa di Sulawesi Utara sangat terkait dengan perilaku pasar hasil antara atau hasil akhirnya dan keadaan industri yang mengolahnya. Fenomena-fenomena ini tidak sepenuhnya terjadi di Sulawesi Utara saja, tetapi dapat berada di wilayah lain atau di luar negeri melalui jalur perdagangan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan keragaan perdagangan kelapa rakyat dan menyelidiki bentuk dan perilaku pasarnya, dengan melakukan pengamatan pada bulan Agustus – Oktober 1989.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain adalah: i) petani kelapa berada pada kedudukan yang paling lemah dalam sistem perdagangan kelapa; ii) persaingan diantara pedagang atau pengolah sebetulnya ada, tetapi tidak efektif karena mahal biaya angkutan per satuan volume, dan malahan menyebabkan persaingan yang tidak sehat, sehingga sistem pemasaran agak didominasi oleh industri bermodal kuat; dan akhirnya iii) industri pengolah hasil kelapa juga merupakan pedagang yang mengantar-pulaukan atau mengekspornya.

PENDAHULUAN

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi dan luas areal kelapa daerah Propinsi Sulawesi Utara adalah yang terbesar diantara propinsi-propinsi lain di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, propinsi Sulawesi Utara memiliki surplus produksi kelapa yang siap diperdagangkan, baik untuk melayani keperluan antar pulau maupun ekspor. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa tentunya masalah perdagangan hasil kelapa ini akan mempengaruhi perkembangan perkelapaan di Sulawesi Utara. Mengingat lebih dari 95 persen kelapa dihasilkan oleh perkebunan rakyat, baik buruknya pasar kelapa tersebut akan berdampak langsung terhadap perekonomian rakyat di Sulawesi Utara.

Umumnya komoditas hasil pertanian rakyat, termasuk hasil kelapa, rawan terhadap keadaan mutu dan pemasaran, apalagi hasil kelapa rakyat di Sulawesi Utara terkait langsung dengan perdagangan internasional. Lebih lanjut, gatra perdagangan hasil kelapa rakyat tersebut kemungkinan besar tidak hanya menyangkut bentuk penerimaan harga yang rendah saja, melainkan juga dapat mengait pada kerawanan ketahanan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Perlu dikemukakan

bahwa wilayah Sulawesi Utara bagian Utara hampir seluruhnya berupa pantai memanjang dan kepulauan (Sangihe Talaud) yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik, yang sekaligus dapat dikatakan sebagai daerah perbatasan (frontir) dengan dunia luar. Selain itu, daerah ini berjarak cukup jauh dari pusat kendali negara (Jakarta), sehingga gangguan kerawanan yang bersumber dari perekonomian kelapa rakyatnya akan dapat secara mudah merambat ke kerawanan politik dan sosial budaya.

Hingga saat ini alternatif pengganti perekonomian petani di daerah produsen kelapa, seperti di Sulawesi Utara, dengan komoditas lain agaknya belum ada. Walaupun mungkin tanaman kelapa rakyat di Sulawesi Utara ini mirip dengan "hutan kelapa" daripada kebun pertanian, namun masih terbuka peluang untuk diperbaiki oleh tangan-tangan profesional, dari bidang budidaya sampai ke pasca panen dan pengembangan produk terutama melalui sistem pemasarannya. Dari sudut lain, "hutan kelapa" tersebut merupakan salah satu pengaman dan pelestari sumberdaya alam (tanah, air dan iklim) di daerah setempat.

*) Staf peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran keragaan perdagangan kelapa rakyat di daerah surplus produksi, yang perekonomian rakyatnya dipengaruhi kuat oleh komoditas kelapa seperti Sulawesi Utara ini. Beberapa hal yang terkait dan diketengahkan pada kajian ini antara lain adalah: dukungan produksi dan penyerapannya, rantai dan tujuan pasar komoditas, informasi, gejala dan pembentukan harga, dan kedudukan petani dalam keseluruhan sistem perdagangan kelapa/kopra.

METODA PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini umumnya adalah bersifat sekunder karena pengumpulannya mengandalkan fihak lain, walaupun data dan informasi primer dikumpulkan juga secara langsung pada waktu penelitian lapangan dilakukan.

Jenis data sekunder yang dikumpulkan terutama meliputi perkembangan luas areal produksi, alokasi produksi, nilai dan volume komoditas yang diperdagangkan. Data ini diperoleh dari instansi-instansi dan lembaga penelitian pemerintah dari tingkat kabupaten sampai propinsi dan dari kalangan swasta seperti pedagang, pabrikan, dan pengusaha pengolah lainnya.

Analisis yang dilakukan adalah secara deskriptif dan grafis sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara

sebagai daerah produksi utama kelapa rakyat di Indonesia. Namun, pengamatan yang intensif dipusatkan di dua kecamatan, yakni Dimembe dan Tenga di Kabupaten Minahasa.

Pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Agustus – Oktober 1989.

GAMBARAN UMUM PRODUKSI KELAPA

Dari data statistik 1987 (Tabel 1), luas areal tanaman kelapa rakyat di Sulawesi Utara mencapai 252828 ha, dengan produksi total 239525 ton setara kopra. Jika dibandingkan dengan luas tanaman rakyat lainnya (cengkeh, pala dan kopi), luas tanaman kelapa rakyat mencapai 76 persen dari luas perkebunan rakyat, sehingga tanaman kelapa rakyat mempunyai kedudukan strategis dalam perekonomian regional.

Produksi kelapa di Sulawesi Utara sebagian besar (58,86%) berasal dari Minahasa (Tabel 1), sisanya berasal dari Bolaang Mongondow (13,76%), Gorontalo (13,75%), Sangihe Talaud (12,23%), Kotamadya Gorontalo (0,76%), dan Manado (0,64%). Proporsi penyebaran produksi ini tercermin juga dari proporsi penyebaran luas areal tanamnya. Jadi produksi dan areal tanaman kelapa terpusat di Minahasa.

Tampaknya pemusatan produksi kelapa ini berkaitan dengan jauh dekatnya kegiatan ini terhadap pemusatan infrastruktur ekonomi dan pemasaran. Daerah Minahasa relatif berjarak dekat dengan pelabuhan samudera Bitung dan lapangan udara Sam Ratulangi, yang memungkinkan pemasaran kelapa dari Minahasa lebih cepat berkembang.

Tabel 1. Luas areal dan produksi kelapa rakyat di daerah Sulawesi Utara, 1987.

Daerah/Kabupaten	Luas (ha)	Produksi (ton)
1. Minahasa	134247 (53,098)	142245 (59,386)
2. Bolaang Mongondow	38245 (15,127)	31258 (13,049)
3. Gorontalo	35926 (14,209)	32407 (13,529)
4. Sangihe-Talaud	41455 (16,396)	30165 (12,594)
Kotamadya		
1. Gorontalo	1593 (0,630)	1861 (0,777)
2. Manado	1362 (0,539)	1589 (0,663)
T o t a l	252828 (100)	239525 (100)

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara (1987).

Penyerapan Produksi

– Alokasi produksi

Tabel 2 menggambarkan alokasi produksi kelapa di Sulawesi Utara untuk konsumsi minyak kelapa, kelapa segar, dan kopra/minyak yang diperdagangkan. Tampak bahwa sebagian besar (93,22%) kelapa siap diperdagangkan ke luar daerah (ekspor dan antar pulau) atau diserap oleh industri-industri setempat.

Dalam ukuran ekuivalen kopra, konsumsi minyak kelapa dan kelapa segar masyarakat Sulawesi Utara masing-masing hanya sekitar 5502 ton (2,23%) dan 10981 ton (4,45%). Hal ini dapat memberi petunjuk bahwa di Sulawesi Utara gatra perdagangan lebih mendominasi masalah perkelapaan daripada produksi dilihat dari dampaknya terhadap petani, masyarakat, dan ekonomi wilayahnya.

Tabel 2. Alokasi produksi kelapa Propinsi Sulawesi Utara, 1987 (ekivalen kopra).

Produksi/Alokasi	Volume (ton)	%
Produksi	246.604	100
Konsumsi lokal	16.483	6,68
– Minyak kelapa	5.502	2,23
– Kelapa segar	10.981	4,45
Bibit	t.a	t.a
Surplus siap diperdagangkan	230.112	93,32

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara (1987). diolah t.a = data tidak tersedia, (diduga reatif kecil).

Dilihat dari sifatnya, bentuk dan jumlah komoditas yang diperdagangkan dapat berbeda dari waktu ke waktu. Hingga awal Pelita II ekspor hasil kelapa berbentuk kopra lebih dominan dibanding minyak kelapa. Keadaan ini berubah pada periode Pelita IV, yakni ekspor dalam bentuk minyak kelapa menjadi dominan, sementara dalam bentuk kopra hampir tidak ada.

Alokasi untuk ekspor dan bungkil kelapa relatif teratur sejak Pelita I hingga kini. Memasuki periode Pelita IV ekspor hasil kelapa menjadi lebih beragam, antara lain ditandai oleh berkembangnya ekspor dalam bentuk tepung kelapa dan arang tempurung walaupun jumlah volumenya masih relatif kecil. Kemungkinan faktor permintaan luar negeri dan teknologi masih menjadi kendala pengembangannya lebih lanjut.

Meskipun demikian, tidaklah berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa penganeka-ragaman hasil kelapa ini dapat membangkitkan perekonomian kelapa di Sulawesi Utara. Alternatif pasar untuk komoditas-komoditas baru tersebut perlu secara aktif dipelajari dan dijajaki. Misalnya untuk hasil seperti bungkil, coir fibre, dan kayu batang kelapa.

Diukur dalam nilai, bentuk minyak kelapa lebih mendominasi perdagangan antar pulau dibanding kopra. Namun dari segi volume yang diperdagangkan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Dibanding dengan alokasi untuk ekspor, pasar dalam negeri (antar pulau) relatif kurang beragam.

– Industri Pengolahan dan Perolehan Bahan Baku

Karena melimpahnya bahan baku kelapa yang ada di Sulawesi Utara, maka banyak investor yang masuk dan mengolah bahan baku tersebut. Tabel 3 menampilkan lima jenis industri pengolah yang bekerja pada tahun 1988. Dari kelima jenis di atas, jumlah yang paling banyak adalah industri pengolah minyak kelapa segar (30 unit), menyusul minyak goreng (11 unit) dan minyak kelapa kopra (9 unit).

Tetapi banyaknya unit industri pengolah ternyata tidak mencerminkan kemampuan penyerapan bahan baku. Yang menunjukkan besarnya kemampuan menyerap bahan baku adalah justru jenis industri pengolahnya. Ternyata industri minyak kelapa mampu menyerap bahan baku lebih banyak (yakni sekitar 300 ribu ton kopra per tahun) daripada jenis industri lainnya, disusul kemudian oleh industri minyak kelapa segar setara 25 ribu ton kopra. Pada jenis industri lainnya, kemampuan penyerapan bahan bakunya relatif kecil (Tabel 3).

Yang menarik adalah, jika kemampuan produksi bahan baku kelapa yang ada di Sulawesi Utara (Tabel 2), dibandingkan dengan kemampuan seluruh industri pengolahan yang menyerapnya (Tabel 3), ternyata ada ketidak-sesuaian. Kapasitas total penyerapan bahan baku kelapa (kira-kira 346 ribu ton kopra per tahun) lebih besar dibanding produksi bahan bakunya (kira-kira 247 ribu ton kopra per tahun). Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan industri pengolah kelapa kurang memperhatikan keterkaitannya dengan penyediaan bahan baku. Sudah tentu hal ini akan menimbulkan peluang terjadinya persaingan secara terselubung maupun terang-terangan, yang kurang sehat. Pada gilirannya hal

Tabel 3. Industri pengolahan kelapa/kopra menurut jumlah, kapasitas ijin, tenaga kerja dan permodalannya di Sulawesi Utara, 1988.

Jenis industri	Jumlah (buah)	Kapasitas ijin (ton/tahun)	Kebutuhan bahan baku (ton kopra/tahun)	Tenaga kerja (orang)	Modal		
					Tetap	Kerja (Rp 1000)	Total
1. Minyak kelapa kopra	9	182676,0	303564,0	1669	8975234,20	27602039,00	36577273,20
2. Minyak kelapa segar	30	12418,4	24776,8	726	1550002,74	1174872,25	2724874,99
3. Refine coconut oil	2	16815,0	—	60	1709948,00	329571,80	2039519,80
4. Tepung kelapa	2	10440,0	17193,0	893	2733276,00	424900,30	3159176,30
5. Minyak goreng	11	202,9	405,85	94	27071,00	31127,65	58198,65
Jumlah	54	222552,3	345939,6	3442	14995532,00	29563510,94	44559042,94

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Sulawesi Utara (1988).

ini akan memberi dampak negatif pada sistim pemasaran bahan bakunya, terutama di tingkat petani.

Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa persaingan yang ketat terjadi baik dalam satu jenis industri maupun antar jenis industri dalam memperebutkan bahan baku. Dalam industri pengolahan minyak kelapa kopra, persaingan ini sangat menonjol karena besar dan kemampuannya tidak seragam.

Industri pengolah berskala besar ("konglomerat") umumnya bertindak sebagai pemimpin pasar ("market leader") bahan baku, sementara industri-industri sejenis lainnya menempatkan dirinya sebagai penerima keadaan ("price taker"). Meskipun demikian, mereka tidak dapat secara mutlak memerankan diri sebagai "monopsonist". (Hal ini disebabkan harga kopra dan minyak kelapa dibentuk oleh pasar dunia). Walaupun demikian, kehadiran industri besar dan berteknologi tinggi ini pernah mematikan dan meresahkan industri-industri berskala lebih kecil, industri minyak kelapa kopra maupun minyak kelapa segar.

Persaingan perebutan bahan baku pada jenis industri yang berbeda tampak antara industri pengolahan minyak kelapa kopra dan industri pengolahan minyak kelapa segar. Bagi industri pengolah minyak kelapa kopra berskala besar, keberadaan industri-industri minyak kelapa segar yang pada mulanya banyak juga terdapat di sekitar daerah produsen bahan baku dirasa mengganggu. Suatu kenyataan yang terlihat adalah bahwa industri-industri pengolahan minyak skala rumah tangga sudah jarang dijumpai.

Salah satu faktor strategis yang menyebabkan apakah suatu unit pengolahan kelapa kuat adalah jumlah modal yang dimilikinya. Dalam persaingan ketat di lapangan, terlihat bahwa industri minyak

kelapa kopra lebih mampu mengembangkan sayapnya daripada industri lain. Dari nisbah rata-rata besar modal terhadap jumlah industri dan tenaga kerjanya, industri minyak kelapa kopra jauh mengungguli minyak kelapa segar, yakni Rp 4 milyar banding Rp 91 juta per unit industri, dan Rp 22 juta banding Rp 4 juta per tenaga kerja. Industri lain, seperti industri pengolah tepung kelapa, nisbahnya lebih kecil daripada nisbah industri minyak kelapa kopra. Sementara itu industri "Refine Coconut Oil" tidak terkait langsung dengan bahan baku kelapa rakyat.

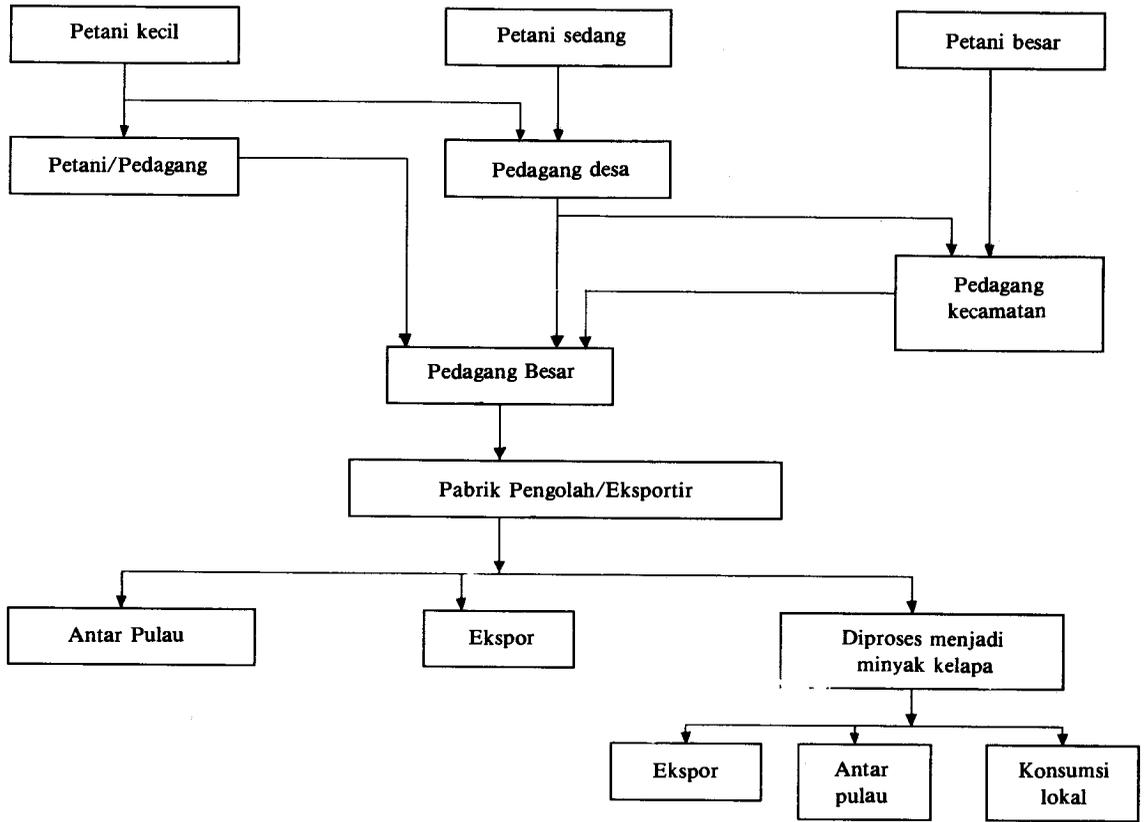
PERDAGANGAN KOMODITAS KELAPA DAN KOPRA

Skema Jalur Perdagangan

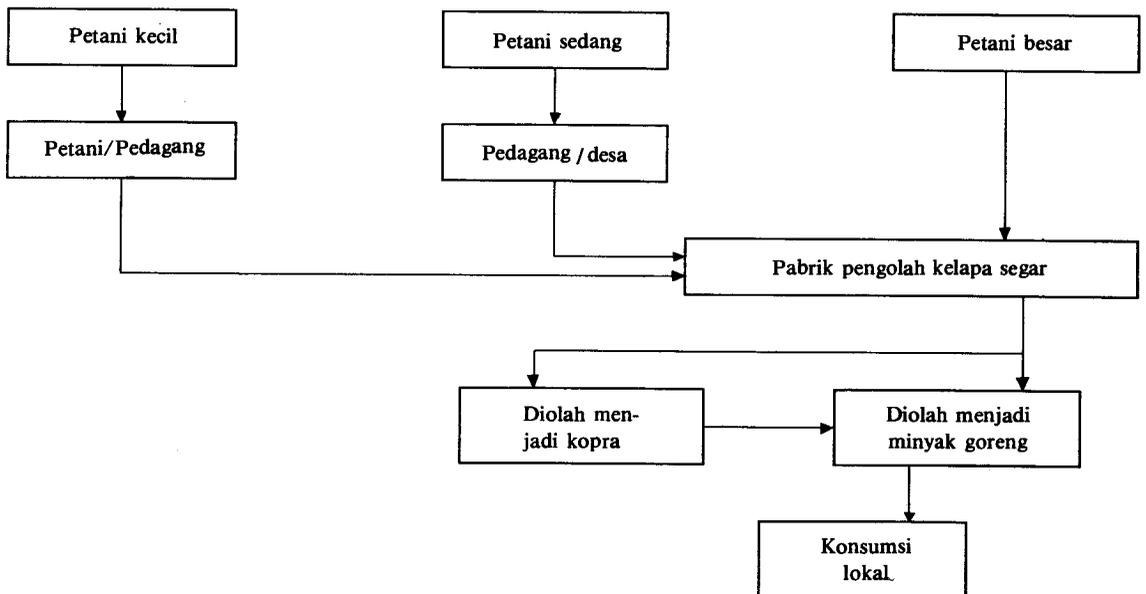
Komoditas hasil kelapa yang mempunyai jalur perdagangan yang relatif jelas adalah kelapa segar dan kopra. Jalur ini terbentuk karena adanya pasar (permintaan) yang teratur dari pabrik pengolah terhadap bahan baku kelapa. Gambar 1 dan 2 masing-masing memperlihatkan jalur pasar kopra dan kelapa segar dengan pola yang khas (proporsi aliran komoditas tidak dicantumkan karena datanya tidak diperoleh).

Kopra

Jalur perdagangan kopra berporos pada pabrik pengolah minyak. Karena lokasi produsen kopra (petani kelapa) relatif banyak dan menyebar, hampir tidak dijumpai pabrik pengolah minyak menerima kopra langsung dari petani, tetapi umumnya melalui perantara pedagang desa. Biasanya yang lebih leluasa adalah pedagang



Gambar 1. Rantai pemasaran kopra di Sulawesi Utara.



Gambar 1. Rantai pemasaran kelapa segar di Sulawesi Utara.

kecamatan, mengingat pedagang ini umumnya adalah langganan pemasok kopra dalam jumlah relatif besar.

Pedagang ini dapat memperoleh bahan baku kopra langsung dari petani maupun pedagang pengumpul desa. Pengumpulan langsung dari petani umumnya terjadi jika lokasi kebun kelapa petani dekat dengan pedagang kecamatan.

Gambarannya agak berbeda sedikit apabila arah pusat pemasaran lokal adalah pabrik berskala besar. Jalur pasarnya cenderung agak rumit. Penerimaan atau pembelian kopra langsung dari petani hampir dipastikan tidak terjadi.

Untuk menyalurkan kopra ke pabrik besar ini, pedagang-pedagang pengumpul harus berhubungan dengan agen-agen yang sudah ditunjuk atau mempunyai hubungan kontrak dengan pabrik. Bentuk hubungannya terbatas pada pemberian modal dan perantara sumber informasi harga pabrik.

Di muka telah disebutkan bahwa kapasitas industri pengolahan yang ada lebih besar daripada produksi kelapa/kopra di Sulawesi Utara, sehingga supaya pedagang dapat memperoleh barang (kelapa/kopra), maka mereka menciptakan semacam perlombaan dengan memberikan pelayanan kepada petani. Bentuk pelayanan umumnya berupa *panjar* atau pembayaran di muka, sebelum panen kelapa berlangsung. Dengan cara demikian pedagang yang memberikan pelayanan yang baik akan merasa aman, karena seakan-akan petani sudah diikat *panjar* itu. Hanya saja, untuk melakukan hal ini pedagang memerlukan modal yang tidak sedikit. Sehingga tidaklah mustahil apabila di balik rantai pemasaran kopra tersebut, ada hubungan kesaling-terkaitan antara petani, pedagang hingga pabrik.

Pabrik pengolah kopra (terutama pabrik pengolahan besar) umumnya juga berperan sebagai pedagang kopra antar pulau atau eksportir, sehingga mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang dan alternatif pasar yang ada. Pada saat mana pabrik ini berperan sebagai pengolah bahan baku dapat merupakan tanda bahwa memproduksi minyak kelapa lebih menguntungkan dibanding memperdagangkan kopra. Begitu pula sebaliknya, pada saat mana pabrik tidak melakukan pengolahan melainkan menjual kopra ke luar pulau atau ekspor menandakan bahwa pasar minyak kelapa sedang lesu.

Kelapa Segar

Rantai pasar kelapa segar yang umumnya

sebagai bahan baku minyak kelapa relatif sederhana. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pabrik pengolah minyak tidak mampu menjangkau produsen kelapa dengan jarak radius di atas 30 km. Demikian pula dalam memasarkan hasil olahan minyak kelapanya. Salah satu penyebab ketidak-mampuan ini adalah mahalnya biaya angkutan. Oleh karena itu adalah masuk akal apabila pabrik pengolah ini memiliki kapasitas terpasang yang relatif kecil seperti tampak pada Tabel 3.

Untuk radius pendek, rantai pasar kelapa segar ini dapat bersaing dengan kopra, sehingga keberadaan pabrik ini memberi manfaat yang terasa bagi petani kecil yang berdekatan dengan pabrik. Dalam pembelian kelapa petani, pabrik sendiri tidak terikat pada sesuatu jumlah atau mutu. Dengan demikian banyak petani yang langsung menjual kelapanya ke pabrik tanpa harus melalui perantaraan pedagang. Kalaupun pedagang ada, mereka umumnya adalah pedagang kecil atau pedagang desa.

Namun, karena persaingan yang begitu ketat untuk memperebutkan bahan baku kelapa, pabrik pengolah ini tidak akan merasa aman jika beroperasi tanpa melakukan ikatan kepada petani, yakni melalui pemberian uang muka. Meskipun demikian, faktor jarak atau radius lokasi produsen tetap merupakan kendala penting yang harus diperhitungkan. Selain itu, pabrik ini tidak mutlak sepanjang waktu mengolah minyak kelapa segar. Atas dasar pertimbangan ekonomi, yakni manakala pengolahan minyak tidak menguntungkan, pabrik ini akan menyimpan, menimbun atau memperdagangkan kopra. Kopra yang diperdagangkan berasal dari kelapa segar yang tidak diolah menjadi minyak (Gambar 2).

Wilayah Tujuan Perdagangan

Berdasarkan data dari Kanwil Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara (1987), perdagangan hasil kelapa rakyat Sulawesi Utara adalah pasar ekspor dan antar pulau. Pasar internasional (ekspor) terbagi menurut jenis hasil olahannya, yaitu: minyak kelapa, bungkil kelapa dan tepung kelapa.

Tujuan perdagangan minyak kelapa Sulawesi Utara yang utama adalah Amerika Serikat dan Belanda yang mencakup sekitar 78 persen dari seluruh volume ekspor (60.478 ton), dengan nilai sekitar 77 persen dari nilai ekspor (AS \$ 23.889.983) pada tahun 1987. Negara-negara pengimpor lain

adalah RRC, Italia, Jerman Barat, Aljazair dan Perancis dengan volume dan nilai yang hampir sama, di bawah 10 persen.

Akan halnya bungkil kelapa, hanya dua negara yang tercatat mengimpornya dari Sulawesi Utara yakni Belanda dan Jerman Barat, yang masing-masing merupakan 69 dan 31 persen volume ekspor (59.645 ton), serta 68 dan 32 persen dari nilai ekspor (AS \$ 6.617.802) pada tahun 1987. Sementara itu, ekspor tepung kelapa ditujukan ke hanya tiga negara, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Jepang dengan persentase volume masing-masing sebesar 65,30 dan 5 persen dari ekspor total 495 ton, dan persentase nilai berturut-turut sebesar 56,39 dan 5 persen dari ekspor total bernilai AS \$ 355.313 pada tahun 1987.

Dari keterangan di atas tampaklah bahwa nilai ekspor terbesar diberikan oleh minyak kelapa, menyusul kemudian bungkil kelapa. Ekspor tepung kelapa, dibanding kedua komoditas tersebut, adalah relatif kecil. Inipun tampaknya terjadi karena adanya permintaan khusus, dan belum diproduksi teratur. Hal ini sebetulnya dapat dijadikan sebagai permintaan efektif. Mengapa keadaan ini tidak terjadi, perlu dikaji lebih lanjut. Perlu dikemukakan pula, bahwa hingga saat ini ekspor langsung minyak kelapa dan bungkil kelapa ke luar negeri masih belum lancar. Ekspor kedua komoditas tersebut pada saat ini masih harus melalui pelabuhan Surabaya (Tanjung Perak) atau Jakarta (Tanjung Priok). Hal ini sudah tentu membawa akibat pada bertambah mahal biaya angkut per satuan volume. Sehingga, secara umum keunggulan komparatif komoditas ekspor Sulawesi Utara menjadi berkurang.

Perdagangan antar pulau adalah menonjol pada komoditas minyak kelapa dan kopra. Pelabuhan tujuan perdagangan antar pulau umumnya Sura-

baya (Tanjung Perak). Agaknya, perdagangan antar pulau untuk minyak kelapa relatif lebih teratur dibanding perdagangan ekspor. Hal ini dapat dimengerti mengingat: (i) Jawa kekurangan produksi minyak kelapa dan kopra karena Jawa adalah pusat konsumen, dan (ii) sebagian besar industri pengolahan minyak kelapa yang ada di Indonesia berkedudukan di Jawa.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa volume kopra yang diperdagangkan antar pulau semakin menurun dengan laju 2 persen per tahun, walaupun harganya menaik dengan laju 13 persen per tahun. Hal ini barangkali berkaitan dengan semakin berkembangnya industri pengolahan yang dibangun di pusat produksi, yakni di Sulawesi Utara seperti terlihat dalam Tabel 4, oleh karena bahan baku kopra ini sudah dapat diserap di lokasi.

Bagi minyak kelapa, sebagai komoditas yang siap pakai, ternyata tetap diantar-pulaukan dengan laju 2 persen per tahun, dan harganya meningkat dengan laju 14 persen per tahun. Dengan sendirinya laju pertumbuhan nilai komoditas yang diantar-pulaukan adalah 16 persen per tahun.

Berapa besarnya angka perbandingan antara volume ekspor dengan volume yang diperdagangkan antar pulau, khususnya untuk minyak kelapa dan kopra, tidak diperoleh gambaran yang tepat dari waktu ke waktu. Demikian pula untuk volume kopra yang diperdagangkan antar pulau dan yang diolah pabrik lokal. Agaknya, faktor yang menentukan angka perbandingan tersebut adalah nisbah harga minyak kelapa dan kopra.

Akan halnya komoditas minyak yang berasal dari kelapa segar, daerah pemasarannya umumnya tidak melewati radius kabupaten, karena biaya pemasaran dan angkutan yang sangat tinggi sehingga pengolah maupun pedagang tidak berani mengambil resiko kerugian.

Tabel 4. Tingkat laju pertumbuhan volume, harga, dan nilai kopra dan minyak kelapa yang diperdagangkan antar pulau dari Sulawesi Utara, 1969-1988.

Uraian	Rataan	Laju pertumbuhan	Korelasi
Kopra			
- Volume (ton)	34.201,85	-0,02	-0,32
- Harga (Rp/kg)	183,87	0,13	0,91
- Nilai (Rp.1000)	5.504.226,42	0,11	0,84
Minyak kelapa			
- Volume (ton)	44.895,90	0,02	0,16
- Harga (Rp/kg)	392,29	0,14	0,94
- Nilai (Rp.1000)	17.444.334,45	0,16	0,77

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Sulawesi Utara (1989), diolah.

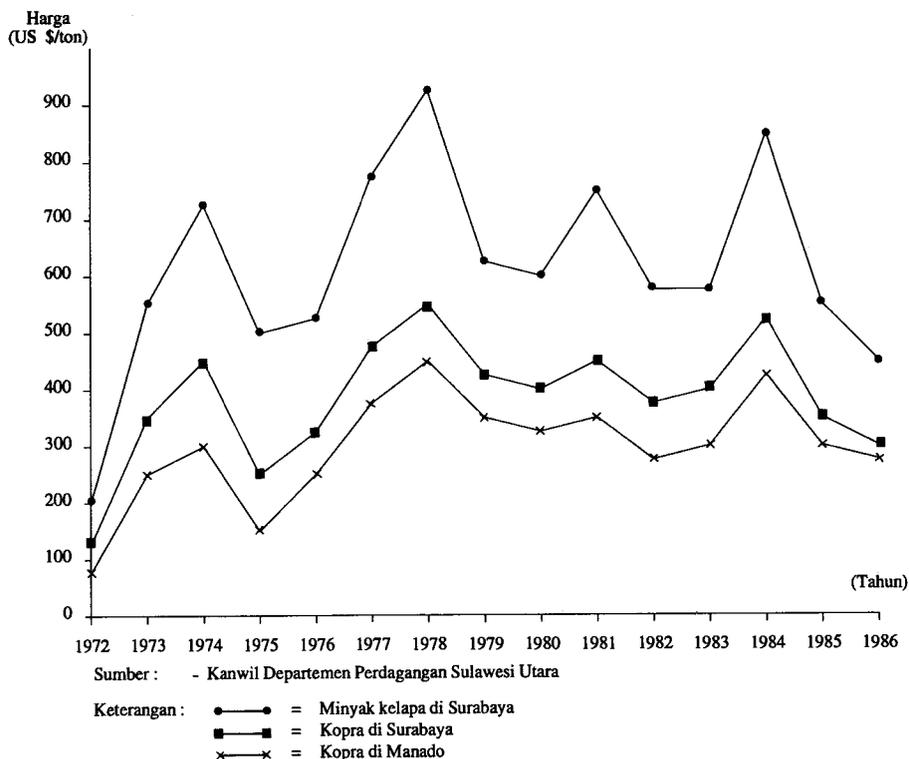
Keterkaitan Harga Lokal, Nasional dan Dunia

Kopra dan minyak kelapa merupakan komoditas perdagangan dunia. Walaupun pangsa produksi kopra Indonesia besar, secara agregat kemampuan Indonesia mengekspor hasil kelapa (kopra dan minyak kelapa) relatif kecil. Oleh karena itu jelaslah kiranya bahwa harga kopra dan minyak dalam negeri tidak bebas sama sekali dari pengaruh harga dunia. Pada gilirannya harga dunia ini juga akan mempengaruhi harga hasil kelapa (kopra dan minyak kelapa) di pusat-pusat produsen kelapa dalam negeri, termasuk di Sulawesi Utara. Apalagi mengingat kenyataan bahwa sebagian besar produksi kelapa rakyat di Sulawesi Utara merupakan surplus yang harus diperdagangkan.

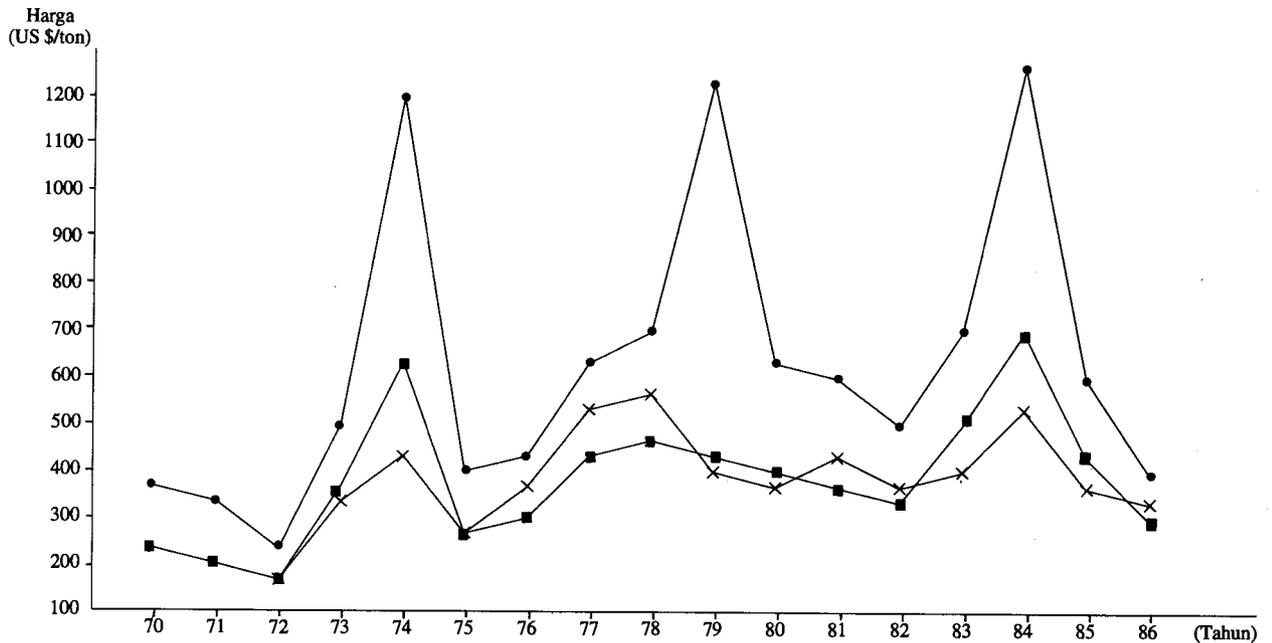
Melalui Gambar 3 terlihat bahwa perkembangan harga kopra di Manado dari tahun ke tahun (1972 - 1986) hampir merupakan bayangan penuh perkembangan harga kopra di Surabaya. Dari gambar tersebut juga tampak bahwa perkembangan harga kopra hampir merupakan bayangan penuh perkembangan harga minyak kelapa di Surabaya. Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa harga

kopra di Manado dibentuk oleh harga kopra dan minyak kelapa di Surabaya. Sebagai gambaran, perkembangan harga kopra di Surabaya lebih mencerminkan gambaran perkembangan harga kopra di pasaran dunia daripada perkembangan minyak kelapanya (Gambar 4).

Beberapa implikasi yang dapat ditarik dari perkembangan harga kopra dan minyak kelapa di atas antara lain: **pertama**, gejala harga kopra dunia ditransmisikan secara penuh pada harga kopra dalam negeri. Pada gilirannya gejala ini ditransmisikan pula ke daerah-daerah produsen, termasuk Sulawesi Utara. Jika harga kopra jatuh di pasaran dunia, maka petani kopra di Sulawesi Utara akan terpukul. **Kedua**, keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengaturan harga kopra dalam negeri tidak berjalan dan tidak akan efektif karena dominannya gejala harga dunia tadi dalam pembentukan harga dalam negeri. **Ketiga**, dilihat dari sisi petani kelapa rakyat, gejala harga ini cenderung kurang menguntungkan, apalagi dalam keadaan lembaga-lembaga penunjang perekonomian petani, seperti KUD, belum mampu berdiri tegak.



Gambar 3. - Perkembangan harga kopra di Manado dan Surabaya dan minyak kelapa di Surabaya, 1972 - 1986.



Sumber: Kanwil Departemen Perdagangan Sulawesi Utara.

Keterangan :
 x—x = Harga kopra di Surabaya
 ■—■ = Harga kopra di pasar dunia
 ●—● = Harga minyak kelapa di pasar dunia

Gambar 4. Perkembangan harga minyak kelapa dan kopra di pasaran dunia, dan Surabaya, 1970/1972 - 1986.

Perkembangan Nisbah Harga

Di muka telah dikemukakan bahwa baik harga kopra maupun minyak kelapa dari tahun ke tahun bergejolak mengikuti harga pasaran dunia. Tetapi dapat dikemukakan, bahwa nisbah harga kopra dalam rupiah terhadap dollar AS yang seharusnya tercermin dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kurang sesuai dipakai untuk menyoroti perkembangan harga kopra maupun minyak kelapa. Hal ini sesuai dengan yang ditemukan di lapangan, bahwa petani kelapa di Sulawesi Utara banyak yang mengatakan: "Walaupun harga kopra naik, namun tidak selaju kenaikan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, seperti beras". Bahkan ada beberapa petani yang membandingkan kenaikan harga kopra (dalam nilai rupiah) dengan kenaikan harga emas di pasaran. (Harga emas menurut mereka, melaju relatif jauh lebih cepat dari pada harga kopra).

Selanjutnya, ada baiknya kita membandingkan harga kopra dengan minyak kelapa. Tabel 5 menunjukkan perkembangan nisbah harga bulanan kopra terhadap minyak kelapa di pasaran lokal di Sulawesi Utara. Nisbah harga kopra gudang (kadar air sekitar 5 persen) dan kopra harian (kadar air sekitar 15 persen) masing-masing sekitar 0.4312 dan 0.3936. Apabila angka ini dibandingkan dengan nisbah harga di pasaran dunia sekitar 0.6000, maka angka nisbah harga kopra di Sulawesi Utara ini relatif rendah. Dari keadaan ini dapat ditafsirkan bahwa dibandingkan dengan pasar dunia, pasar kelapa dan minyak kelapa Sulawesi Utara relatif kurang efisien. Beberapa penyebab ketidakefisienan ini adalah pola pemasaran yang kurang sehat atau industri pengolahan minyak kelapa yang kurang efisien, terutama karena tidak mencapai kapasitas terpasangnya karena terlalu besarnya kapasitas ini dan atau terbatasnya bahan baku.

Tabel 5. Perkembangan nisbah harga bulanan kopra terhadap minyak kelapa di Sulawesi Utara.

Bulan	Nisbah harga kopra terhadap minyak kelapa	
	Kopra gudang (KA ± 5 persen)	Kopra harian (KA ± 15 persen)
Januari	0.4813	0.4220
Februari	0.4327	0.3764
Maret	0.3994	0.3619
April	0.4118	0.3862
M e i	0.3945	0.3682
Juni	0.3974	0.3677
Juli	0.4410	0.3899
Agustus	0.4380	0.4114
September	0.4103	0.3780
Oktober	0.4270	0.3900
Nopember	0.4606	0.4252
Desember	0.4807	0.4458
Rata-rata nisbah	0.4312	0.3936

Sumber: Kanwil Departemen Perdagangan Sulawesi Utara, 1988

Masalah ketidakefisienan pola pemasaran dan industri pengolah minyak kelapa kopra dapat juga saling mempengaruhi atau tumpang tindih, mengingat industri pengolah minyak kelapa kopra umumnya berperan sebagai pedagang kopra antar pulau maupun ekspor. Pada skala lokal (propinsi) perdagangan kopra dikendalikan oleh jaringan industri minyak kelapa kopra berskala besar (konglomerat). Dalam keadaan demikian, ketidakefisienan ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada petani, sebagaimana umumnya terjadi. Ada kemungkinan, malahan justru pengolah besarlah yang tidak efisien karena terikat pada pengembalian modal investasi dan demi pengamanan kapasitas terpasang unit pengolahannya. Adalah suatu ke-

butuhan bagi pemerintah untuk mengawasi keberadaan industri-industri pengolahan itu agar tidak memanfaatkan secara sepihak adanya fungsi ganda (sebagai pedagang dan pengolah kopra) yang dilakukannya selama ini.

Biaya Pemasaran dan Harga Kopra Petani

Salah satu cara sederhana mengetahui efisien tidaknya kegiatan pemasaran dapat ditelusuri dari struktur biaya atau margin pemasaran. Di bawah ini akan dibahas harga dan biaya pemasaran kopra, mengingat dalam bentuk kopra inilah sebagian besar hasil tanaman kelapa rakyat dipasarkan. Tabel 6 memperlihatkan secara sederhana struktur harga dan margin pemasaran kelapa dalam bentuk kopra di Sulawesi Utara pada bulan Agustus – Oktober 1989.

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa harga kopra yang diterima petani kelapa adalah sekitar 70 persen dari harga pabrik pengolah minyak kelapa kopra. Mengingat baiknya infrastruktur pemasaran di Sulawesi Utara, maka harga yang diterima petani tersebut dapat dikatakan relatif rendah. Rendahnya penerimaan harga kopra petani ini membuktikan lebih lanjut adanya ciri oligopsoni di dalam pasar kopra. Seperti telah disebutkan di muka, pada tingkat harga kopra di petani Rp 360 per kg, kebutuhan hidup petani belum dapat terpenuhi. Menurut informasi dan perhitungan Dinas Perkebunan dan Kanwil Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, batas harga kopra terendah, sesuai kebutuhan hidup petani kelapa adalah sekitar Rp 380 per kg. Dan dari hasil wawancara pun diperoleh kesan bahwa petani merasa memperoleh harga kopra yang kurang sesuai, apa-

Tabel 6. Struktur harga dan margin pemasaran kopra di Sulawesi Utara, 1989.

Uraian	Harga dan biaya (Rp/kg)	Proporsi harga dan biaya		
		(%)	(%)	(%)
Harga pabrik	510	100	141,7	579,5
Harga pedagang besar	495	97,1	137,5	562,5
Harga ped. pengumpul	460	90,2	127,8	522,7
Margin/biaya pemasaran	88	17,3	24,4	100
– Penjemuran	15	2,9	4,17	17,0
– Penyusutan	54	10,6	15,0	61,4
– Susut timbang	5	2,0	147	5,7
– Angkutan	10	2,0	2,8	11,4
– Lainnya	4	0,8	1,1	4,5
Harga yang diterima petani	360	70,6	100	409,1

lagi jika dibandingkan dengan penerimaan dan kondisi harga umum pada tahun-tahun sebelumnya.

Apabila Tabel 6 itu diteliti lebih seksama, ternyata porsi penyusutan kopra dalam kegiatan pemasaran menempati porsi terbesar, yaitu sekitar 61,4 persen. Sedang biaya angkutan, sesuai keadaan di lapangan dapat dinilai wajar.

Penyusutan dan penjemuran oleh pedagang sering dijadikan alasan untuk menekan harga kopra petani. Keadaan ini bukan tidak disadari petani. Tetapi karena kendali penentuan mutu dan harga kopra berada di tangan pedagang, umumnya petani tidak dapat berbuat banyak.

Sering dijumpai dan dikemukakan pula oleh petani bahwa walaupun sebetulnya kopranya telah berkadar air sekitar 10–15 persen, pedagang pengumpul tetap menilainya berkadar air sekitar 15–20 persen, sehingga mereka sekaligus menentukan harga sesuai dengan mutu kadar air ini.

Dengan cara penentuan kadar air yang sepihak ini, petani kurang bergairah melakukan kegiatan pasca panen dengan baik. Agaknya suatu alat tera kadar air dari petugas yang tidak memihak sangat dibutuhkan oleh petani-petani kopra, sehingga harganya lebih memadai.

Beberapa sebab yang mungkin mempengaruhi rendahnya harga pasar kopra di tingkat petani, antara lain:

- (1) Sistem pemasaran kopra yang berjalan sekarang ini menempatkan petani sebagai penerima saja dari kadar mutu dan harga kopranya yang ditentukan oleh pembeli. Pedagang umumnya menilai secara pukul rata kadar air dan mutu kopra petani. Walaupun peluang teknis untuk meningkatkan mutu (dan dengan sendirinya harga) melalui penanganan pasca panen ada dan telah disadari petani, tetapi secara ekonomi peluang ini dimatikan oleh pedagang. Sehingga jarang sekali kita menjumpai ada petani yang membuat kopra gudang walaupun harganya menarik.
- (2) Keterikatan petani terhadap pedagang sangat kuat, sehingga petani selalu dalam posisi yang lemah. Mengapa hal ini terjadi, dapat diterangkan sebagai berikut. Pedagang memberikan uang panjar (ijon) kepada petani sebelum masa panen berlangsung, karena petani membutuhkannya untuk menutupi kebutuhan keluarganya pada waktu itu. Di pihak lain, hal inipun dipakai pedagang sebagai salah satu cara untuk menjamin kelancaran pemasokan barang da-

ngan (kopra). Pengembalian uang panjar ini akan diperhitungkan kemudian pada saat transaksi kopra berlangsung dengan tingkat harga yang berlaku pada saat itu. Namun, umumnya harga yang diterima petani selalu lebih rendah sebesar Rp 5 – Rp 10 per kg kopra dari harga yang berlaku di pasar lokal, disamping pemotongan kadar air yang berlebihan. Pemotongan harga di atas merupakan tingkat bunga dari uang panjar yang diberikan pedagang tadi selama kurun waktu peminjaman. Kondisi seperti ini menempatkan petani dalam posisi yang lemah dan ketergantungan terhadap pedagang semakin besar.

- (3) Keterbatasan informasi pasar dari petani yang sengaja diciptakan oleh pedagang dan pengolah (industri). Hal ini tercermin dari mata rantai pemasaran yang telah terjadi sedemikian rupa, yakni petani tidak mungkin dapat berhubungan atau melakukan transaksi langsung dengan kalangan industri pengolah, walau dalam skala besar sekalipun. Pemasokan bahan baku (kopra) ke pengolah merupakan porsi pedagang besar dengan sistem kontrak. Dengan demikian informasi harga hanya diketahui lewat pedagang besar dan selanjutnya turun ke pedagang pengumpul.
- (4) Sesuai dengan sifat pasar yang cenderung oligopsoni ini, pihak pedagang dan pengolah sangat berperan dalam penentuan harga. Di antara pedagang seolah-olah telah terjadi suatu kerjasama (kartel) dalam penentuan tingkat harga, sekaligus dalam suatu wilayah atau daerah harga antara pedagang yang satu dengan yang lain relatif sama.

Perlu lebih ditekankan bahwa dalam keseluruhan kegiatan pemasaran hasil kelapa dalam bentuk kopra, posisi petani yang lemah berada di bawah kendali pedagang. Walaupun industri pengolahan minyak kelapa segar banyak, tetapi mereka agaknya berada di bawah bayang-bayang industri pengolah minyak kelapa kopra. Atau dengan kata lain, pemasaran kelapa segar belum dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi kelemahan pemasaran kopra petani. Keadaan ini diperparah lagi dengan belum berfungsinya lembaga-lembaga perekonomian pedesaan dengan baik. Patut disayangkan juga bahwa pengaturan pemasaran kopra, dalam kenyataan di lapangan, tidak berjalan efektif.

Peluang petani untuk menikmati nilai tambah dari kegiatan pasca panen tidak dapat diwujudkan,

agaknya semata-mata disebabkan oleh ketidak-sempurnaan pasar, dan bukan dari masalah teknologinya. Keadaan ini diperburuk lagi oleh kenyataan, bahwa industri pengolahan minyak kelapa kopra di Sulawesi Utara terkait dengan berkembangnya konglomerasi industri minyak goreng. Sementara ini terlihat, bahwa munculnya konglomerat minyak goreng kurang memihak pada perbaikan nasib petani kelapa.

Selain hal-hal yang disebut di atas perlu ditekankan juga bahwa faktor sosial-budaya tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem pemasaran kelapa di Sulawesi Utara, termasuk harga kopra yang diterima petani.

Dari pengamatan lapangan terlihat, bahwa kehidupan sosial-budaya masyarakat perkotaan tercermin kuat pada masyarakat pedesaan di Minahasa. Budaya kehidupan materialistik daerah perkotaan dan metropolitan mengalir deras mewarnai kecenderungan kehidupan generasi muda pedesaan Sulawesi Utara. Sementara itu, pola kehidupan dimasa kejayaan cengkeh masih melekat kuat pada petani-petani Minahasa. Keadaan ini sudah barang tentu membawa akibat pada semakin beratnya beban pengeluaran rumah tangga petani kelapa. Tampaknya, desakan dan dorongan materialistik dan hidup boros ini turut menjadi penyebab terjeratnya petani kelapa dengan budaya *panjar* dalam penjualan kelapa.

Jadi, selain karena adanya ketidak-sempurnaan dalam pemasaran, pola budaya kota yang melanda pedesaan ikut melemahkan posisi petani kelapa.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Kesimpulan

Dari lima jenis industri pengolahan kelapa yang ada di Sulawesi Utara, yang dominan adalah yang mengolah minyak kelapa kopra dan kelapa segar. Walaupun jumlahnya relatif banyak, secara agregat industri pengolahan minyak kelapa segar mempunyai kemampuan yang masih jauh di bawah kapasitas pabrik pengolahan kelapa kopra. Dalam keadaan seperti ini, adanya persaingan antar industri yang mengarah ke bentuk kurang sehat sulit dihindarkan. Justru yang masih terasa janggal adalah, persaingan tersebut ternyata tidak menguntungkan petani. Sementara itu, industri bermodal raksasa (konglomerat) yang memegang kendali pemasaran hasil kelapa di Sulawesi Utara lebih ber-

fikir jangka pendek, yakni memaksimalkan keuntungannya sendiri.

Dilihat dari jenisnya, ada dua pola perdagangan yang dominan, yaitu perdagangan kelapa segar dan kopra. Bahan yang diperdagangkan ini pada gilirannya diproses menjadi minyak kelapa (minyak kelapa segar dan minyak kopra), dan jalur perdagangan kelapa segar relatif lebih sederhana daripada kopra. Namun, berhubung industri minyak kopra ini mendominasi perdagangan kelapa di Sulawesi Utara, kesederhanaan jalur perdagangan kelapa segar tersebut tidak mencerminkan alternatif ekonomi yang menguntungkan petani kelapa.

Secara umum dapat dikatakan, pola perdagangan hasil kelapa (kopra dan minyak kelapa) mengikuti ciri oligopsoni. Sehingga, walaupun infrastruktur fisik perdagangan memadai, dalam keseluruhan kegiatan perdagangan, petani kelapa berada pada posisi yang lemah ("price taker"). Perdagangan hasil kelapa pada dasarnya dikuasai oleh kerjasama antara pedagang dan industri pengolah hasil kelapa berskala besar. Gejala tidak sehatnya perdagangan hasil kelapa ini dicirikan pula oleh relatif rendahnya harga kopra di tingkat petani.

Tingkat dan perkembangan harga kopra di Manado tidak dapat dipisahkan dari perkembangan harga kopra maupun minyak kelapa di Surabaya, dan Surabaya merupakan pusat pemasaran hasil kelapa nasional. Selanjutnya harga kopra dan minyak kelapa di Surabaya merupakan bayangan harga kopra dan minyak kelapa pasaran dunia. Keadaan ini dapat menjadi tidak menguntungkan, misalnya pada saat harga kopra dan minyak kelapa pasaran dunia jatuh, hampir secara otomatis akan ditransmisikan secara penuh ke tingkat petani. Dengan demikian nasib petani kelapa akan bertambah buruk.

Sejak tahun 1974 harga kopra di daerah produsen, dalam nilai dolar AS, tidak meningkat secara berarti. Selain itu, baik harga kopra maupun minyak kelapa bergejolak secara tajam. Keadaan ini seharusnya membuka penglihatan kita bahwa efektivitas pengaturan harga kopra di tingkat petani oleh pemerintah belum terasa. Apalagi pada keadaan sekarang, dengan peran koperasi yang belum dapat diandalkan sama sekali, adanya permainan dalam penentuan harga kopra petani oleh pedagang, menjadi sulit dikendalikan. Ketidakstabilan harga kopra ini tercermin pada relatif tidak teraturnya perkembangan angka nisbah harga antara kopra dan minyak kelapa. Demikian pula peran pemerintah daerah di Sulawesi Utara pun masih

relatif lemah, terutama jika dilihat dari keikut-sertaannya dalam pengaturan harga kopra di pasaran secara wajar.

Walaupun secara agregat laju permintaan hasil kelapa dalam negeri melebihi laju produksinya, lancarnya perdagangan antar pulau dan ekspor belum menjamin harga kopra di tingkat petani membaik. Menurut perhitungan, dalam tingkat harga seperti saat sekarang perekonomian petani cenderung mengalami kemunduran dibanding masa-masa sebelumnya. Dalam keadaan demikian, petani kelapa akan merasa kurang mendapat insentif untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan pengembangan perkelapaan nasional.

Sisi lain yang ikut melemahkan petani antara lain adalah begitu derasnya perkembangan pola kehidupan kota, yang cenderung boros dan konsumtif. Pada keadaan ini, petani merasa sulit menyisihkan sebagian dari hasil kelapanya untuk memperbaiki usahatani kelapanya. Salah satu bentuk yang melemahkan kedudukan petani kelapa adalah berkembang luasnya pembayaran kelapa petani dengan sistem *panjar*. Sudah barang tentu, dengan sistem demikian petani akan sulit mendapatkan harga kopra yang wajar dari pedagang. Bahkan dikhawatirkan, karena desakan mengikuti pola kehidupan kota, petani-petani kelapa sedikit demi sedikit dapat menjual kebun kelapanya. (Keadaan ini di beberapa tempat sudah teramati). Pada gilirannya, hal ini akan membahayakan keseluruhan sendi perekonomian kelapa rakyat di Sulawesi Utara, karena alternatif atau diversifikasi perekonomian rakyat lainnya masih sangat terbatas.

Saran Kebijakan

Informasi pasar (tentang harga kelapa dan harga hasil sampingan) perlu disebar-luaskan kepada petani agar struktur dan perilaku pasar kelapa lebih bersaing, sehingga petani kelapa dapat memiliki "bargaining position" yang lebih baik. Selain itu pemerintah daerah perlu secara efektif memantau dan kalau dapat menjadi penengah dalam proses terjadinya transaksi jual-beli komoditas hasil kelapa. Dengan demikian sengketa ketidak-sesuaian harga dan mutu hasil antara petani dan pedagang dapat dihilangkan.

Ketidakstabilan dan kemerosotan harga kopra merupakan salah satu sebab tidak sehatnya pe-

masaran hasil kelapa rakyat di Sulawesi Utara, dan kemungkinan besar berlaku juga di daerah surplus produksi lainnya. Mengingat begitu besarnya peran kelapa (minyak kelapa sebagai 9 bahan pokok dan bahan baku industri yang cukup penting), dalam perekonomian rakyat (produsen dan konsumen), maka adalah suatu harapan agar masalah perkelapaan ini ditangani lebih baik.

Walaupun di pasaran dalam negeri belum berkembang, hasil sampingan kelapa seperti bungkil, *coir-fibre*, arang tempurung, dan kayu batang kelapa mempunyai tempat di pasaran ekspor yang cukup mapan. Deregulasi ekonomi perlu dikaitkan untuk mengaktifkan sumberdaya ekonomi yang masih "tersembunyi" ini, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan nilai ekonomi tanaman kelapa selain kopra. Jika hal ini terwujud, perekonomian kelapa rakyat akan dapat berkembang lebih baik dibanding saat sekarang.

Kegiatan produksi, yaitu usahatani kelapa rakyat, dan industri pengolah cenderung berdiri sendiri-sendiri atau tidak terjalin dalam suatu hubungan yang serasi. Jika direkayasa dengan baik, hubungan antara industri pengolahan hasil kelapa dan petani produsen kelapa dapat dipandang sebagai hubungan kemitraan, yang satu membutuhkan yang lain. Walaupun bukan dalam bentuk nilai uang, dukungan bahan baku kelapa rakyat terhadap industri pengolah dapat dinilai sebagai saham petani untuk ikut serta memutar kegiatan industri pengolah. Oleh karena itu bentuk hubungan ini perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah dan tidak memihak, serta kalau memungkinkan dijabarkan dalam bentuk penjualan saham kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara, 1987. Sulawesi Utara Dalam Angka. Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara. Manado.
- Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara, 1988. Daftar Industri Pengolahan Kelapa/Kopra di Sulawesi Utara. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara. Manado.
- Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara, 1989. Realisasi Antar Pulau Kopra dan Minyak Kelapa dari Sulawesi Utara Sejak Pelita I Sampai Pelita IV. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara. Manado.